

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu industri primer terbesar dan tertua di dunia, sektor perikanan berkontribusi pada ketahanan pangan jutaan orang dan merupakan sumber protein utama di berbagai negara. Tingginya permintaan pasar akan produk-produk perikanan mendorong banyaknya praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*). *IUU Fishing* adalah kontributor utama penangkapan ikan berlebihan secara global, yang mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian maritim, dan keberlanjutan perikanan. Alih-alih mengumpulkan uang sewa dari eksploitasi sumber daya, pemerintah di berbagai negara telah secara aktif mensubsidi penangkapan ikan yang mengarah pada upaya penangkapan ikan yang lebih besar dan penipisan sumber daya laut. Peru sebagai negara dengan kapasitas tangkap maupun olahan hasil perikanan laut tertinggi ketiga di dunia (FAO, 2020), menyadari efek negatif dari subsidi perikanan tersebut. Peru lantas menginisiasi pembahasan mengenai penghapusan subsidi perikanan di WTO. Hasilnya, pada tahun 2022 di Jenewa, Swiss, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO menghasilkan Perjanjian Subsidi Perikanan yang memuat penghapusan subsidi perikanan penyebab IUU-F.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor di balik kebijakan Peru menginisiasi Perjanjian Penghapusan Subsidi Perikanan di WTO. Teori Rasionalisme dipilih sebagai landasan teori karena teori ini mampu menjelaskan

kondisi yang menyebabkan aktor yang bersangkutan berperilaku rasional dengan menggunakan logika untung-rugi (*Logic of Consequences*). Argumen penelitian ini adalah Peru menginisiasi Perjanjian Penghapusan Subsidi Perikanan WTO bukan karena tujuan perlindungan lingkungan melainkan motif ekonomi yang kuat. Argumentasi tersebut berhasil dibuktikan dari berbagai temuan dalam penelitian ini, diantaranya pernyataan pemerintah Peru akan pentingnya sektor perikanan bagi perekonomian negara, data produksi sektor perikanan Peru dan besaran pendapatan negara dari sektor tersebut hingga peran sektor perikanan Peru dalam pembukaan lapangan kerja.

Dari penelitian mengenai motif ekonomi Peru di balik Perjanjian Subsidi Perikanan WTO yang saya lakukan selama setahun ini, hal yang saya pelajari adalah bahwa kebijakan luar negeri selalu didasarkan pada kepentingan rasional dan keuntungan strategis yang dapat diambil dari setiap situasi (Machiavelli, 1532).

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai ekonomi sebagai motif di balik inisiatif Peru untuk mengadakan perjanjian penghapusan subsidi perikanan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil sebagai langkah-langkah selanjutnya: Pertama, saran untuk pengembangan penelitian lanjutan. Beberapa saran penelitian yang mungkin menarik untuk dilakukan adalah dampak subsidi perikanan terhadap pasar ikan global, pengaruh subsidi perikanan terhadap kelangsungan sumber daya ikan, dan pengaruh subsidi perikanan terhadap negara-negara berkembang.

Kedua, saran untuk pemerintah Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari daratan, Indonesia harus mampu mengoptimalkan hasil tangkapan laut dalam negeri sehingga memungkinkan adanya pendapatan negara dari kegiatan ekspor sektor tersebut. Kementerian Maritim dan Kementerian Pertahanan harus bahu-membahu mengamankan wilayah laut Indonesia sementara Kementerian Luar Negeri harus secara tegas memperjuangkan hak negara ini untuk mendahulukan kemakmuran nelayan lokal.